

Judul : Kasus penjualan anak, Komisi VII: usut tuntas, bongkar jaringan TPO
Tanggal : Minggu, 29 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kasus Penjualan Anak

Komisi VII: Usut Tuntas, Bongkar Jaringan TPPO

ANGGOTA Komisi VIII DPR Surahman Hidayat mengungkapkan keprihatinan atas dugaan kasus penjualan anak oleh ibu kandungnya sendiri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Polda Sulsel diminta mengusut tuntas kasus itu karena tidak ada alasan apa pun yang membenarkan tindakan keji tersebut.

Surahman mengingatkan aparat kepolisian agar tidak hanya memproses pelaku utama, tapi juga mendalami potensi keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Polisi wajib membongkar sindikat yang memberikan iming-iming uang kepada pelaku. Pengusutan menyeluruh sangat dibutuhkan demi memberi rasa keadilan pada keluarga korban.

Menurutnya, upaya pencarian anak-anak yang diduga sudah dijual harus jadi prioritas utama aparat penegak hukum. Mereka harus segera ditemukan agar bisa dikembalikan kepada ayah kandungnya selaku pihak pelapor. "Keselamatan fisik dan mental anak-anak itu adalah yang utama saat ini," katanya, kemarin.

Selanjutnya, dia meminta segera mengamankan satu anak yang saat ini masih tinggal bersama terduga pelaku di rumah

aman. Pendampingan psikososial perlu diberikan secepatnya supaya bocah malang itu tidak jadi korban kekerasan berikutnya. Langkah preventif ini harus dilakukan untuk memutus rantai trauma pada anak.

Kasus demikian ini, sambungnya, merupakan alarm keras bagi Pemerintah untuk segera memperkuat sistem perlindungan sosial di tengah masyarakat. Kementerian Sosial (Kemensos) bersama lembaga terkait wajib meningkatkan intervensi terhadap keluarga yang masuk kategori rentan. Dukungan ekonomi serta konseling keluarga harus diberikan secara nyata dan berkelanjutan.

Selain itu, tokoh agama dan organisasi sosial juga harus diajak untuk lebih aktif dalam mencegah potensi praktik perdagangan anak di lingkungan masing-masing. Pencegahan efektif harus dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga dan komunitas sekitar. "Peran pemuka agama sangat besar untuk mengingatkan umat agar menjaga titipan Tuhan," katanya.

Komisi VIII DPR, lanjutnya, berkomitmen penuh mengawal setiap kebijakan terkait perlindungan anak di Indonesia. Termasuk pengetatan pengawasan terhadap implementasi



Surahman Hidayat

UU Perlindungan Anak serta UU Pemberantasan TPPO. Sehingga regulasi yang ada benar-benar mampu melindungi hak dasar setiap anak bangsa.

Dia juga mengingatkan, perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, bukan hanya beban Pemerintah semata. Masyarakat diharap lebih peduli pada kondisi anak-anak yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. "Semua pihak harus memastikan anak tumbuh dalam suasana aman dan penuh limpahan kasih sayang," ucapnya.

Diketahui, Polda Sulsel saat ini tengah mendalami laporan dugaan penjualan anak dengan

inisial korban MT yang melibatkan ibu kandungnya. Kasubdit II Ditreskrim PPA dan PPO, Kompol Zaki Zungkar menyebut, pihaknya masih bekerja maksimal di lapangan. Kepolisian tidak ingin terduga pelaku memiliki kesempatan untuk melarikan diri.

Tim penyidik, kata Zaki, terus melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap laporan yang masuk sejak awal Maret 2026 itu. Laporan bernomor LP/B/248/III/2026 itu diharapkan bisa segera jadi titik terang untuk membongkar jaringan sindikat perdagangan orang di wilayah Sulsel.

Dalam laporan itu, sambung Zaki, pelapor bernama Anto meniadakan istrinya sendiri karena diduga telah menjual empat orang anak ke pihak lain. Korban terdiri dari tiga anak kandung yang masih balita serta satu orang keponakan. "Kejadian ini sangat mengejutkan karena pelaku tega menjual darah dagingnya sendiri secara sistematis," ujarnya.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menambahkan, kasus kekerasan terhadap anak, termasuk dugaan penjualan anak, merupakan fenomena kompleks yang memiliki banyak faktor penyebab. Kasus itu tidak bisa

dilepaskan dari persoalan mendasar dalam keluarga. Terutama tekanan ekonomi dan kondisi sosial.

Persoalan-persoalan itu, kata Veronica, harus dilihat secara menyeluruh, dan tidak bisa ditangani secara parsial. Salah satu kunci utamanya adalah memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah. "Kalau kita melihat apa yang terjadi ini adalah kita harus kembali kepada bagaimana mengembalikan ekonomi itu ke desa," jelasnya.

Veronica juga mengingatkan agar penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk Pemerintah terus dilakukan secara masif. Peningkatan kapasitas SDM serta integrasi antarlembaga dari pusat hingga ke daerah harus jadi prioritas. Hal itu mencakup sinkronisasi kerja antara UPTD PPA dengan seluruh petugas.

Dia menegaskan, upaya perlindungan tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah kasus terjadi. Perlindungan harus dilaksanakan terpadu, dimulai dari tingkat desa dan dilakukan dengan perencanaan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak. "Kalau hanya menunggu kasus lalu baru ditangani, itu susah," tandasnya. ■ PYB